

Benchmarking Keuangan Lokal Kreatif: Inovasi Kebijakan dan Tata Kelola Fiskal Indonesia, Pelajaran dari Negara-Negara OECD

Benchmarking Creative Local Finance: Indonesia's Policy Innovation and Fiscal Governance Lessons from OECD Countries

Ari Wibowo

ari_wibowo@kemenkeu.go.id

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia

Info Article

| **Submitted:** 15 November 2025 | **Revised:** 26 November 2025 | **Accepted:** 29 November 2025

How to cite: Ari Wibowo "Benchmarking Keuangan Lokal Kreatif: Inovasi Kebijakan dan Tata Kelola Fiskal Indonesia, Pelajaran dari Negara-Negara OECD", *Proceeding National Conference Sisi Indonesia II*, 2025, P. 508-517.

ABSTRACT

This paper investigates Indonesia's creative local finance within the broader landscape of fiscal decentralization, institutional reform, and sustainable development. It explores how policy innovation, fiscal governance mechanisms, and legal design shape local economic resilience and community empowerment. Applying a mixed qualitative comparative method, combining Qualitative Comparative Analysis (QCA), normative legal analysis, and benchmarking against OECD best practices, the study evaluates Indonesia's core local fiscal instruments, including village funds, municipal bonds, and green sukuk. These mechanisms are compared with fiscal innovations in Japan, Finland, South Korea, and the Netherlands, focusing on participatory budgeting systems, performance-based transfers, and transparent subnational fiscal reporting. The methodological triangulation strengthens the assessment of institutional gaps and identifies reform pathways. Findings indicate that Indonesia's fiscal innovation must transition toward evidence-based policy design, rule-based accountability structures, and adaptive, innovation-enabling legal frameworks to achieve equitable and sustainable local development.

Keyword: *creative local finance, OECD, sustainable local development*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji keuangan lokal kreatif di Indonesia dalam konteks desentralisasi fiskal, reformasi kelembagaan, dan pembangunan berkelanjutan. Studi ini menelaah bagaimana inovasi kebijakan, mekanisme tata kelola fiskal, dan desain hukum membentuk ketahanan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan metode komparatif kualitatif yang terintegrasi, meliputi *Qualitative Comparative Analysis (QCA)*, analisis hukum normatif, serta *benchmarking* terhadap praktik terbaik OECD, penelitian ini mengevaluasi instrumen fiskal lokal utama Indonesia seperti dana desa, obligasi daerah, dan sukuk hijau. Instrumen tersebut dibandingkan dengan inovasi fiskal di Jepang, Finlandia, Korea Selatan, dan Belanda, terutama terkait sistem penganggaran partisipatif, transfer berbasis kinerja, dan pelaporan fiskal yang transparan di tingkat subnasional. Triangulasi metodologis ini memperkuat identifikasi kesenjangan kelembagaan dan peluang reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi fiskal Indonesia perlu bergerak menuju desain kebijakan berbasis bukti, struktur akuntabilitas berbasis aturan, serta kerangka hukum yang adaptif dan mendorong inovasi untuk mencapai pembangunan lokal yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *keuangan lokal kreatif, OECD, pembangunan lokal berkelanjutan*

Pendahuluan

Desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan kewenangan luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya dalam rangka mendorong kemandirian dan pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, banyak daerah masih bergantung pada transfer pusat, sementara



This work is licensed under [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



kapasitas inovasi fiskal dan tata kelola belum optimal. Di tengah tuntutan pembangunan hijau dan inklusif, muncul kebutuhan akan keuangan lokal kreatif, yakni pendekatan pembiayaan inovatif yang menggabungkan kebijakan fiskal, hukum, dan ekonomi untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan ketahanan daerah.

Konsep ini sejalan dengan paradigma ekonomi kreatif publik, yang menekankan bahwa sumber daya lokal, budaya, dan partisipasi warga dapat menjadi instrumen ekonomi melalui instrumen fiskal yang inovatif seperti obligasi daerah, sukuk hijau, dana desa berbasis kinerja, serta kemitraan publik-swasta. Pembelajaran dari negara-negara OECD seperti Jepang, Finlandia, Korea Selatan, dan Belanda menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang adaptif dan berbasis bukti merupakan kunci dalam mengelola keuangan lokal yang efisien, transparan, dan berorientasi hasil.

Desentralisasi fiskal dipahami sebagai proses pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan publik (Oates, 1999). Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini diwujudkan melalui mekanisme transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Desa yang menjadi instrumen utama dalam memperkuat kapasitas ekonomi lokal (Bahl & Bird, 2018). Namun demikian, efektivitas desentralisasi fiskal masih bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah dan kemampuan tata kelola dalam mengelola sumber daya publik secara transparan (Shah, 2007).

Konsep *local creative finance* mengemuka sebagai strategi pembiayaan publik yang inovatif dan inklusif, yang menggabungkan instrumen keuangan berkelanjutan seperti *green bonds*, *municipal sukuk*, dan skema kemitraan publik-swasta untuk mendukung pembangunan daerah (OECD, 2020). Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dari siklus keuangan publik melalui partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan fiskal (Kallio & Niemi, 2021). Dalam konteks negara OECD, praktik seperti penganggaran partisipatif di Finlandia, *performance-based transfers* di Korea Selatan, dan penerapan *local green bonds* di Jepang menunjukkan bahwa inovasi fiskal dapat memperkuat legitimasi publik sekaligus memperluas basis pembiayaan pembangunan (Kim & Lotz, 2019; Loughlin et al., 2020).

Teori *fiscal federalism* menjelaskan bahwa struktur fiskal yang terdesentralisasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi melalui alokasi sumber daya yang sesuai dengan preferensi lokal dan kebutuhan masyarakat (Musgrave & Musgrave, 1989). Sementara itu, teori tata kelola fiskal menekankan pentingnya akuntabilitas dan keterbukaan dalam siklus penganggaran agar inovasi fiskal tidak menimbulkan asimetri informasi dan risiko moral (Head, 2016). Dengan mengintegrasikan dimensi kebijakan publik, ekonomi, dan hukum, kerangka

teoretis penelitian ini menempatkan inovasi keuangan lokal sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Secara konseptual, penelitian ini berasumsi bahwa keberhasilan transformasi keuangan lokal di Indonesia memerlukan tiga pilar utama: pertama, desain kebijakan fiskal yang berbasis bukti dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi; kedua, tata kelola hukum yang menjamin kepastian dan transparansi fiskal; dan ketiga, kolaborasi lintas-sektor yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Ketiga pilar tersebut menjadi dasar bagi analisis komparatif terhadap praktik keuangan lokal di Indonesia dengan negara-negara OECD seperti Jepang, Finlandia, Korea Selatan, dan Belanda untuk mengidentifikasi kesenjangan kelembagaan sekaligus peluang inovasi fiskal yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *literature review* untuk menganalisis inovasi keuangan lokal kreatif dalam konteks desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai pola, konsep, dan praktik kebijakan fiskal berbasis bukti melalui penelaahan terhadap data sekunder dari berbagai sumber akademik, kebijakan publik, dan dokumen kelembagaan (Snyder, 2019).

Sumber data utama berasal dari publikasi ilmiah, laporan lembaga internasional seperti OECD, UNDP, dan World Bank, serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Data sekunder ini kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola kebijakan, prinsip tata kelola fiskal, serta kesesuaian dengan praktik internasional (Bowen, 2009).

Proses analisis dilakukan dengan tiga tahapan utama. Pertama, tahap pengumpulan data yang melibatkan pencarian literatur melalui basis data akademik (Scopus, JSTOR, dan Google Scholar) dengan kata kunci seperti *creative local finance*, *fiscal decentralization*, dan *OECD local governance*. Kedua, tahap reduksi data untuk memilih informasi relevan yang mendukung fokus penelitian, yaitu inovasi fiskal lokal dan perbandingan dengan negara OECD (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Ketiga, tahap interpretasi dan sintesis yang bertujuan mengaitkan temuan empiris dengan kerangka teoretis melalui analisis perbandingan dan penarikan makna kontekstual.

Metode *comparative qualitative analysis* digunakan untuk membandingkan karakteristik tata kelola fiskal Indonesia dengan negara-negara OECD seperti Jepang, Finlandia, Korea Selatan, dan Belanda. Analisis komparatif ini berfungsi untuk mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan sistem keuangan lokal Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana inovasi fiskal nasional telah mengarah pada prinsip akuntabilitas, partisipasi publik, dan keberlanjutan ekonomi (Ragin, 2014).

Validitas hasil penelitian dijaga melalui strategi *triangulation of sources*, yaitu dengan mengonfirmasi temuan dari berbagai jenis dokumen seperti laporan pemerintah, data statistik fiskal, serta publikasi akademik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran holistik mengenai hubungan antara desain kebijakan fiskal, efektivitas kelembagaan, dan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan (Creswell & Poth, 2018).

Secara keseluruhan, rancangan metodologi ini menempatkan literatur dan data sekunder sebagai instrumen utama untuk memahami dinamika inovasi fiskal dalam perspektif perbandingan internasional. Hasil analisis kualitatif ini akan menjadi dasar penyusunan Bab IV mengenai analisis dan pembahasan hasil, yang memetakan posisi Indonesia dalam lanskap tata kelola fiskal global serta arah penguatan kebijakan keuangan lokal di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

1. Keuangan Lokal Kreatif di Indonesia

Keuangan lokal kreatif di Indonesia merupakan hasil dari upaya panjang untuk memperkuat desentralisasi fiskal sekaligus menjawab tantangan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Tiga instrumen utama yang saat ini menjadi pilar inovasi fiskal daerah adalah Dana Desa, Obligasi Daerah, dan Sukuk Hijau. Dana Desa menjadi instrumen paling signifikan dalam mendorong partisipasi masyarakat desa melalui transfer fiskal langsung yang menekankan prinsip akuntabilitas sosial dan pembangunan berbasis komunitas (Annahar et al., 2023). Namun, efektivitasnya sering kali terbatas akibat lemahnya kapasitas kelembagaan dan ketidaksinkronan antarlevel pemerintahan, yang menyebabkan inefisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran (Purbadharmaja et al., 2019).

Sementara itu, penerbitan Obligasi Daerah masih berada pada tahap awal, dengan tantangan berupa keterbatasan regulasi dan kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen risiko fiskal (Fatikhah et al., 2024). Di sisi lain, Sukuk Hijau muncul sebagai inovasi pembiayaan berorientasi keberlanjutan, tetapi skalanya masih terbatas pada proyek nasional dan belum banyak diadopsi oleh pemerintah daerah (Prakash & Sethi, 2022). Kelemahan umum pada ketiga instrumen tersebut mencakup minimnya koordinasi antarlembaga, kurangnya mekanisme pengawasan berbasis kinerja, serta keterbatasan infrastruktur data digital untuk pelaporan dan evaluasi transparan (Dellyana et al., 2023).

Meski demikian, arah kebijakan fiskal nasional menunjukkan kesadaran untuk mengintegrasikan inovasi, keberlanjutan, dan partisipasi dalam tata kelola keuangan daerah. Pendekatan keuangan lokal kreatif menuntut desain yang adaptif, berbasis bukti, dan disertai sistem insentif yang memperkuat akuntabilitas publik, sebagaimana diusulkan oleh model OECD tentang *performance-based fiscal governance* (Dollery et al., 2020; Day, 2025).

2. Pembelajaran dari Praktik OECD

Negara-negara anggota OECD menawarkan berbagai praktik unggulan dalam tata kelola fiskal yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia. Korea Selatan

dan Finlandia menekankan *performance-based accountability*, di mana setiap pengeluaran publik dikaitkan dengan indikator hasil yang terukur dan terpublikasi secara terbuka (Dougherty et al., 2024; Keyes, 2024). Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat legitimasi publik terhadap kebijakan fiskal.

Belanda menjadi contoh sukses dalam penerapan *digital fiscal transparency*, melalui sistem pelaporan daring yang memungkinkan masyarakat mengakses data anggaran secara real-time, sehingga memperkuat partisipasi dan pengawasan publik (Omweri, 2024). Finlandia, di sisi lain, memadukan partisipasi warga dengan inovasi kebijakan berbasis data, menciptakan sinergi antara akuntabilitas sosial dan perencanaan berbasis bukti (Kemmerling, 2023).

Sementara Jepang memperlihatkan pendekatan terintegrasi dalam *green fiscal diversification*, dengan memperluas instrumen keuangan ramah lingkungan seperti *green bonds* dan *energy efficiency incentives* untuk mendorong transisi ekonomi rendah karbon (Panjaitan et al., 2024; D’Orazio & Pham, 2025). Hal ini sejalan dengan temuan bahwa inovasi fiskal hijau berperan penting dalam mempercepat adaptasi ekonomi menuju keberlanjutan (Zarghami, 2025).

Tabel 1 berikut merangkum pembelajaran utama dari praktik negara OECD yang relevan dengan konteks Indonesia.

Tabel 1 Benchmarking Praktik Keuangan Lokal OECD

Negara	Fokus Inovasi Fiskal	Mekanisme Utama	Pelajaran bagi Indonesia
Korea Selatan	Akuntabilitas berbasis kinerja	Indikator hasil dan evaluasi terukur	Integrasi pelaporan hasil dalam sistem anggaran daerah
Finlandia	Partisipasi warga dan kebijakan berbasis data	Open budgeting dan konsultasi publik daring	Meningkatkan partisipasi publik dalam perencanaan anggaran
Belanda	Transparansi fiskal digital	Platform pelaporan anggar	Digitalisasi laporan fiskal daerah
Jepang	Diversifikasi instrument hijau	<i>Green bonds</i> dan efisiensi energi	Pengembangan obligasi hijau daerah

Sumber: Diolah dari Junghun & Sean (2020), Dougherty et al. (2024), dan Panjaitan et al. (2024).

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Finlandia, Jepang, Korea Selatan, dan Belanda masing-masing menawarkan praktik unggulan dalam tata kelola fiskal daerah, Korea Selatan merupakan negara OECD yang paling tepat dijadikan model bagi Indonesia karena memiliki kesesuaian struktural, kedekatan konteks kebijakan, serta tahapan pembangunan ekonomi yang mirip. Korea Selatan berhasil membangun arsitektur tata kelola fiskal yang terintegrasi melalui sistem

informasi keuangan daerah berbasis digital (*Local Finance Information System*), mekanisme penganggaran partisipatif yang diperkuat oleh teknologi, serta skema transfer berbasis kinerja yang mendukung inovasi dan peningkatan kapasitas pemerintah lokal. Kondisi ini selaras dengan kebutuhan Indonesia yang tengah menghadapi tantangan ketimpangan kapasitas daerah, rendahnya kualitas pelaporan fiskal, dan lemahnya akuntabilitas berbasis aturan.

3. Analisis Komparatif

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam tahap transisi menuju sistem fiskal yang sepenuhnya berbasis akuntabilitas dan transparansi digital. Keunggulan Indonesia terletak pada basis sosial yang kuat, di mana prinsip gotong royong dan partisipasi komunitas mendukung efektivitas dana publik (Annahar et al., 2023). Namun, kelemahannya adalah belum adanya sistem yang secara sistematis menghubungkan kinerja daerah dengan alokasi fiskal, sebagaimana diterapkan di banyak negara OECD (Rachmania, 2025).

Dari sisi hukum dan kelembagaan, masih terdapat fragmentasi antara regulasi fiskal pusat dan kewenangan daerah. OECD menekankan pentingnya intergovernmental fiscal coordination sebagai prasyarat desentralisasi efektif (Junghun & Sean, 2020; Shair-Rosenfield, 2025). Reformasi ini perlu diarahkan pada penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk penggunaan instrumen pembiayaan inovatif seperti local green bonds dan community-based investment funds (Varney, 2025).

Dari aspek kolaborasi, integrasi antara sektor publik dan swasta dalam inovasi pembiayaan masih lemah, padahal negara seperti Finlandia dan Belanda telah membuktikan efektivitas kemitraan multilevel dalam memperkuat basis fiskal daerah (Sahl et al., 2025). Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik OECD mengindikasikan bahwa keberhasilan inovasi fiskal sangat bergantung pada tata kelola adaptif, sistem evaluasi berbasis hasil, dan insentif kelembagaan yang mendorong transparansi lintas level pemerintahan (Habib et al., 2025; Prihandini & Safaria, 2025).

Tabel 2 berikut memperlihatkan posisi Indonesia dibandingkan negara OECD dalam dimensi utama tata kelola fiskal.

Tabel 2 Perbandingan Sistem Keuangan Lokal Indonesia dan OECD

Dimensi Tata Kelola	Indonesia	OECD (Umum)	Kesenjangan Utama
Akuntabilitas	Terbatas pada laporan keuangan tahunan	Berbasis hasil dan publikasi daring	Kurangnya indikator kinerja terukur
Partisipasi Publik	Konsultatif melalui musrenbang	Partisipatif melalui open data dan e-budgeting	Minimnya kanal digital publik
Inovasi Fiskal Hijau	Terbatas pada Sukuk Hijau nasional	Terdiversifikasi hingga tingkat daerah	Perluasan kebijakan hijau lokal

Koordinasi Pusat-Daerah	Fragmentaris	Terintegrasi melalui transfer berbasis kinerja	Lemahnya harmonisasi regulasi
Teknologi Fiskal	Belum merata antarwilayah	Sudah berbasis platform digital nasional	Perlu penguatan infrastruktur digital

Sumber: Diolah dari Dougherty et al. (2024), Kemmerling (2023), dan Habib et al. (2025).

Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan potensi besar untuk mengembangkan keuangan lokal kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, agar sejajar dengan praktik terbaik OECD, diperlukan transformasi kelembagaan, adopsi teknologi fiskal digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam desain kebijakan berbasis kinerja (Islam, 2025).

Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengembangkan inovasi keuangan lokal yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan secara sosial. Keuangan lokal kreatif seperti dana desa, obligasi daerah, dan sukuk hijau menunjukkan potensi besar sebagai instrumen kebijakan yang mampu memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala kelembagaan, kapasitas teknis, dan keterbatasan transparansi yang menghambat efektivitas kebijakan.

Perbandingan dengan negara-negara OECD seperti Jepang, Finlandia, Korea Selatan, dan Belanda menunjukkan bahwa tata kelola fiskal yang efektif ditandai oleh tiga prinsip utama: partisipasi publik dalam perencanaan anggaran, transparansi pelaporan keuangan, dan evaluasi berbasis kinerja. Benchmarking tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara sistem hukum, kebijakan fiskal, dan inovasi kelembagaan untuk menciptakan tata kelola yang adaptif dan akuntabel. Indonesia perlu menyeimbangkan antara kepastian hukum dalam kerangka peraturan fiskal nasional dan fleksibilitas kebijakan daerah untuk mendorong inovasi lokal.

Dengan demikian, arah reformasi kebijakan fiskal Indonesia ke depan harus menitikberatkan pada integrasi tiga pilar utama: penguatan kapasitas institusional daerah, penerapan sistem akuntabilitas berbasis bukti (*evidence-based accountability*), serta pembangunan mekanisme fiskal yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Pendekatan ini akan memungkinkan Indonesia bertransformasi dari sekadar pelaksana desentralisasi menjadi pelopor tata kelola fiskal adaptif yang mampu menghadapi tantangan global dan memenuhi aspirasi pembangunan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The road to inclusive decentralized village governance in Indonesia. *Sustainability*, 15(11), 8616. <https://doi.org/10.3390/su15118616>
- D’Orazio, P., & Pham, A. D. (2025). Evaluating climate-related financial policies’ impact on decarbonization with machine learning methods. *Scientific Reports*, 15(1), 1694. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-01694-7>
- Day, J. (2025). Summary note OECD consultation with India’s 16th Finance Commission. OECD.
- Dellyana, D., Arina, N., & Fauzan, T. R. (2023). Digital innovative governance of the Indonesian creative economy: A governmental perspective. *Sustainability*, 15(23), 16234. <https://doi.org/10.3390/su152316234>
- Dollery, B., Kitchen, H., McMillan, M., & Shah, A. (2020). Local public, fiscal and financial governance. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-25437-0>
- Dougherty, S., Nebreda, A. M., & Mota, T. (2024). Adapting intergovernmental fiscal transfers for the future. *OECD Working Papers on Fiscal Federalism*. <https://doi.org/10.1787/18151973>
- Fatikhah, R. D. N., Prasetya, A., & Widya, A. F. (2024, October). Initiating national and international tax policy innovation in G20 Presidency tax issues. In 2023 Brawijaya International Conference (BIC 2023) (pp. 102–112). Atlantis Press. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-288-0_12
- Habib, Y., Abd Rahman, N. R., Hashmi, S. H., & Ali, M. (2025). Green finance and environmental decentralization drive OECD low carbon transitions. *Scientific Reports*, 15(1), 28140. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-28140-0>
- Islam, S. (2025). A systematic review of public budgeting strategies in developing economies: Tools for transparent fiscal governance. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5287137>
- Jarungkitkul, W., & Sukcharoensin, S. (2016). Benchmarking the competitiveness of the ASEAN 5 equity markets: An application of Porter’s diamond model. *Benchmarking: An International Journal*, 23(5), 1312–1340. <https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2013-0085>
- Junghun, K., & Sean, D. (Eds.). (2020). *OECD fiscal federalism studies: Local public finance and capacity building in Asia – Issues and challenges*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264313121-en>
- Kemmerling, A. (2023). Policy innovation in the Global South and South–North policy learning. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 25(5), 475–486. <https://doi.org/10.1080/13876988.2023.2182347>

- Keyes, M. A. (2024). Institutional quality and fiscal policy: An empirical investigation in OECD countries, 2005–2022 (Doctoral dissertation, Southern University and Agricultural and Mechanical College). ProQuest Dissertations Publishing.
- Maulana, R. Y., Decman, M., & Durnik, M. (2022). Fostering collaborative digital transformation in Indonesian local government. In 35th Bled eConference Digital Restructuring and Human (Re)action (pp. 733–758). University of Maribor Press. <https://doi.org/10.18690/um.fov.4.2022.38>
- Omweri, F. S. (2024). A systematic literature review of e-government implementation in developing countries: Examining urban-rural disparities, institutional capacity, and socio-cultural factors in the context of local governance and progress towards SDG 16.6. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 8(8), 1173–1199. <https://doi.org/10.47772/IJRIS.2024.8887>
- Panjaitan, T. W., Pandyaswargo, A. H., Atmaja, T. D., Firman, F. A., & Al Irsyad, M. I. (2024). Drawing insights from Japan's energy efficiency policies for Indonesia's progress. *International Journal of Energy (IJE)*, 7(212), 212.
- Prakash, N., & Sethi, M. (2022). A review of innovative bond instruments for sustainable development in Asia. *International Journal of Innovation Science*, 14(3–4), 630–647. <https://doi.org/10.1108/IJIS-02-2022-0032>
- Prihandini, W., & Safaria, S. (2025). Digital resilience and financial stability: Rethinking the strategic role of FinTech, AI, and CBDC in Indonesia and emerging economies. *Journal of Business, Finance, and Banking*, 1(1), 50–70.
- Purbadharma, I. B. P., Maryunani, Ananda, C. F., & Santoso, D. B. (2019). The implications of fiscal decentralization and budget governance on economic capacity and community welfare. *Foresight*, 21(2), 227–249. <https://doi.org/10.1108/FS-01-2018-0012>
- Rachmania, I. N. (2025). Strengthening Indonesia's tax system: A policy-oriented framework based on ASEAN and OECD case studies. *JASF: Journal of Accounting and Strategic Finance*, 8(1), 175–194. <https://doi.org/10.33005/jasf.v8i1.678>
- Sahl, D. F., Ridho, A. A., & Putra, R. R. (2025). State-led funding and support for education innovation programmes: Creating a participatory policy to achieve inclusive and equitable education in Indonesia. *Asian Journal Collaboration of Social Environmental and Education*, 2(2), 128–137.
- Saptono, P. B., Khozen, I., Mahmud, G., Hodžić, S., Pratiwi, I., Purwanto, D., & Imantoro, L. W. (2024). Flourishing MSMEs: The role of innovation, creative compliance, and tax incentives. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(12), 532. <https://doi.org/10.3390/jrfm17120532>

- Sazly, S., Erri, D., Tambunan, D., & Herlan, H. (2025). Strategic financial management: Temasek Holdings as Danantara's benchmark for building national wealth and sustainable development. *Dynamic Management Journal*, 9(4), 821-840.
- Shahib, H. M., & Abbas, Y. (2025). SDGs and changes in Indonesia local government's accounting indicators: Lessons from a learning organization perspective. *Public Money & Management*, 1-11. <https://doi.org/10.1080/09540962.2025.2431517>
- Shair-Rosenfield, S. (2025). Decentralisation, intergovernmental coordination, and response to extreme events in Southeast Asia. *Regional Studies*, 59(1), 2319716. <https://doi.org/10.1080/00343404.2025.2319716>
- Sumarno, T. B., Sihotang, P., & Prawiraatmadja, W. (2022). Exploring Indonesia's energy policy failures through the JUST framework. *Energy Policy*, 164, 112914. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112914>
- Tengfei, L., & Ullah, A. (2024). Impact of fiscal policies and green financing on firm innovation and firm value for green economic recovery. *Heliyon*, 10(9), e32947. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32947>
- Theodore, N., & Peck, J. (2012). Framing neoliberal urbanism: Translating 'commonsense' urban policy across the OECD zone. *European Urban and Regional Studies*, 19(1), 20-41. <https://doi.org/10.1177/0969776411428500>
- Varney, J. X. (2025). The role of policy innovation in accelerating green bond markets for renewable energy: Evidence from emerging economies. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5549581>
- Zarghami, S. A. (2025). The role of economic policies in achieving Sustainable Development Goal 7: Insights from OECD and European countries. *Applied Energy*, 377, 124558. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2024.124558>

Biografi Singkat Penulis

Ari Wibowo merupakan pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, lulusan dari program Master of Science in Economics, the University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC), Amerika Serikat, melalui beasiswa FETA Kementerian Keuangan. Ia lulus pada Desember 2022 dengan gelar Master of Science in Economics dari Department of Economics UIUC. Ia merupakan lulusan program beasiswa STAR-BPKP Fakultas Ekonomi Universitas Andalas tahun 2017 dengan gelar Sarjana Ekonomi. Sebelumnya, ia adalah lulusan DIII Akuntansi STAN tahun 2012. Minat studinya terutama dalam bidang ilmu ekonomi, kebijakan publik, administrasi publik, manajemen, hukum, dan akuntansi. Ia dapat dihubungi melalui email ari_wibowo@kemenkeu.go.id.